

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

38. Penandaan Penggunaan Penerimaan Dana Bagi Hasil-Sawit (DBH-Sawit) Kabupaten-Kota

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025							
								KABUPATEN/KOTA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN	1 PENANGANAN JALAN	1 Rekonstruksi/peningkatan struktur;		Panjang Jalan yang dilakukan rekonstruksi/ peningkatan jalan	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan		
						Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan berkala	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
						Panjang jalan yang dilakukan Pemeliharaan rutin	Km	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	
		2 PENANGANAN JEMBATAN	1 Pemeliharaan berkala jembatan;		Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan berkala	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan		
				2 Penggantian jembatan; dan/atau		Panjang jembatan yang dilakukan Penggantian	Meter	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan	
2	KEGIATAN LAINNYA	1 PENDATAAN PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT (PSR)	1 Pembentukan Tim dan Peningkatan Kapasitas Tim		Bimtek	Orang	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
				2 Sosialisasi Kegiatan Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat		Pertemuan	Frekuensi	Masyarakat	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
					3 Pendataan pekebun		Sensus	Orang	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
				4 Pemetaan dan Pemeriksaan Lapangan		Survey	Persil	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah							
				5 Verifikasi dan Validasi Data Pekebun		Pertemuan	Frekuensi	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah							
				6 Penerbitan STDB		Penerbitan surat	Dokumen	a. Masyarakat b. Pemerintah Daerah							
2	KEGIATAN LAINNYA	2 PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK SERTIFIKASI INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) PEKEBUN	1 Pendataan pekebun untuk proses sertifikasi ISPO		Survey	Data pekebun	a. Pekebun b. Perusahaan c. Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya		
				2 Sosialisasi sertifikasi ISPO		Sosialisasi	Orang	Pekebun	3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	
				3 Pelatihan sertifikasi calon Auditor ISPO pekebun		Pelatihan	Orang	Pekebun	3	27	03	2.01	0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
				1) Pembentukan tim kendali internal		Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah	3	27	07	2.01	0009	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	
				2) Pelatihan Tim ICS		Pelatihan	Orang	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
				3) Penyusunan Prosedur/Mekanisme terkait Pemenuhan Prinsip dan Kriteria ISPO		Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
				4) Sosialisasi Prosedur/Mekanisme kepada Anggota Kelembagaan		Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025						
								KABUPATEN/KOTA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
			4 Pendampingan Pekebun untuk Sertifikasi ISPO	5) Pengelolaan Catatan terkait Aktivitas Pekebun dalam rangka Pemenuhan Prinsip dan Kriteria ISPO termasuk Pengelolaan Catatan Kelompok Tani/Koperasi 6) Penyusunan Dokumen Pemenuhan Prinsip dan Kriteria ISPO Pekebun 7) Penjadwalan Kegiatan Audit Internal dan Pelaksanaan Audit Internal 8) Perbaikan temuan atau ketidaksesuaian pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO 9) Penjadwalan audit eksternal	Pertemuan	Frekuensi	a. Pekebun b. Pemerintah Daerah							
2	KEGIATAN LAINNYA	3 PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN	1 Pelatihan petugas penilai usaha perkebunan	1) Pelatihan petugas penilai usaha perkebunan	Petugas penilai usaha perkebunan bersertifikat	Orang	Pemerintah Daerah	3	27	06	2.01	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			2 Persiapan penilaian	1) Koordinasi Penyusunan Jadwal dan rencana penilaian 2) Pengumpulan Data Sekunder 3) Pengumpulan subjek dan objek penilaian lapangan	Notulen Koordinasi, instrumen penilaian Data awal realisasi usaha Subjek dan objek terkait usaha perkebunan yang akan dinilai	Dokumen/ Berkas	Pemerintah Daerah	3	27	06	2.01	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			3 Pelaksanaan Penilaian Lapangan	1) Verifikasi dokumen perusahaan 2) Observasi lapang aspek penilaian usaha perkebunan	Data Hasil Verifikasi Berita Acara, dokumentasi lapangan	Dokumen/ Laporan/ Berita Acara	Pemerintah Daerah Perkebunan Masyarakat sekitar	3	27	06	2.01	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			4 Analisis Penyusunan Hasil Penilaian	1) Analisis kepatuhan usaha 2) Penyusunan Skor/kategori 3) Rekomendasi tindak lanjut	Laporan hasil penilaian usaha perkebunan lengkap dengan rekomendasi Laporan hasil penilaian usaha perkebunan lengkap dengan rekomendasi Laporan hasil penilaian usaha perkebunan lengkap dengan rekomendasi	Dokumen (Rekomendasi, Sk, Penetapan Kelas Kebun)	Pemerintah Daerah	3	27	06	2.01	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
			5 Tindak Lanjut Penilaian Usaha Perkebunan	1). Penyampaian hasil penilaian kepada stakeholder 2) Monev dan Pembinaan Tindak Lanjut hasil perbaikan Perusahaan	Materi sosialisasi, laporan diseminasi, publikasi ringkas Laporan monitoring tindak lanjut	Frekuensi Dokumen Laporan	Masyarakat, Perusahaan, Perkebunan, DPRD, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Perkebunan Masyarakat sekitar	3	27	06	2.01	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	
2	KEGIATAN LAINNYA	4 PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN	1 Pembentukan tim penyusun	- Koordinasi antar OPD - Penerbitan SK Tim Penyusun	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	5	01	02	2.01	000 4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
								4	01	02	2.03	000 1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEPMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025														
								KABUPATEN/KOTA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9														
			2 Pelaksanaan RAD KSB	Pengempusan dan capaian RAD KSB	Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah Daerah	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									
								3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian									
			X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														
2	KEGIATAN LAINNYA	7 REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	1 Pemulihan Lingkungan (Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota)	1).Kegiatan Penghijauan Lingkungan	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
				2). Pembangunan Hutan Kota	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
				3). Perlindungan Mata Air, Kanan Kiri Sungai, Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau	Tutupan Lahan	Hektare	Pemerintah dan Masyarakat	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
				4). Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (Dam Penahan, Gully Plug, Instalasi Pemamenan Air Hujan, Sumur Resapan Air , Lubang Biopori)	Bangunan Dam Penahan, Gully Plug, Instalasi Pemamenan Air Hujan, Sumur Resapan Air , Lubang Biopori	Unit	Pemerintah dan Masyarakat	1	03	02	2.01	0111	Pembangunan Bendungan									
							1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam										
							1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya										
							1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan										
			2	KEGIATAN LAINNYA	8 PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT YANG BELUM TERDAFTAR SEBAGAI PESERTA PROGRAM JAMINAN SOSIAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 luran Jaminan Kecelakaan Kerja		Orang	Orang	Masyarakat	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
						2 luran Jaminan Kematian		Orang	Orang	Masyarakat	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						
						3 luran Jaminan Kesehatan		Orang	Orang	Masyarakat	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat						
2	KEGIATAN LAINNYA	9 KOORDINASI PENGELOAAN DBH SAWIT	1 Koordinasi dalam rangka perencanaan DBH Sawit		Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah dan Masyarakat	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
								5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
			2 Koordinasi dalam rangka pelaksanaan DBH Sawit		Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah dan Masyarakat	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
								5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya									
							5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah										

NO	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN SUB KEGIATAN	OUTPUT	SATUAN OUTPUT	PENERIMA MANFAAT	KODEFIKASI DAN NOMEKLATUR PENANDAAN KEMENDAGRI NO. 900.1-2850 TAHUN 2025					
								KABUPATEN/KOTA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
			Koordinasi dalam rangka 3 monitoring dan evaluasi DBH Sawit		Pertemuan	Frekuensi	Pemerintah dan Masyarakat	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya